

IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA: PENINGKATAN KINERJA APARATUR DESA KAMBINGAN BARAT KABUPATEN SUMENEP

Sugeng Hartanto

sugeng_hartanto@polije.ac.id

Oryza Ardhiarisca

oryza_risca@polije.ac.id

Rahma Rina Wijayanti

rahma@polije.ac.id

Janna Aulia P. Sari

jaupuri@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the benefits, as well as improve the performance of West Kambingan Village Apparatuses in the implementation of the SisKeuDes application. The SisKeuDes application is an application that can assist the Village Government in managing village finances. This research method uses a qualitative descriptive approach. Determination of informants using the interview method and selected informants based on the criteria of need. Informants in this study included village heads, village secretaries, chief of finance and village operators. The research data was obtained from interviews and observations. The results of the study show that the SisKeuDes application is very useful and helps the work of village officials. Village financial management becomes more effective and efficient so as to improve the performance of the Kambingan Barat Village Apparatus.

Keywords: Village Government, Financial Management, SisKeuDes Application, Village Apparatus

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat, serta peningkatan kinerja Aparatur Desa Kambingan Barat dalam implementasi aplikasi SisKeuDes. Aplikasi SisKeuDes merupakan aplikasi yang dapat membantu Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penentuan informan menggunakan metode wawancara dan informan yang dipilih berdasarkan kriteria kebutuhan. Informan dalam penelitian ini antara lain Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan Operator Desa. Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aplikasi SisKeuDes sangat bermanfaat dan membantu pekerjaan aparatur desa. Pengelolaan keuangan desa menjadi lebih efektif dan efisien sehingga mampu meningkatkan kinerja Aparatur Desa Kambingan Barat.

Kata Kunci: Pemerintah Desa, Pengelolaan Keuangan, Aplikasi SisKeuDes, Aparatur Desa

PENDAHULUAN

Tahun 2015 Indonesia berkomitmen untuk memperkuat pembangunan dari daerah pinggiran atau Desa. Pembangunan masyarakat desa dilakukan berdasarkan 3 (tiga) azas, yaitu azas pembangunan integral, azas kekuatan sendiri, dan azas permufakatan bersama (Nain, 2019). Ada beberapa pendapat terkait penelitian terdahulu yang menyatakan pembangunan Desa tidak hanya didukung oleh peranan sumber daya manusia yang

memadai, tetapi harus ada keseimbangan terkait dengan sumber daya lainnya yang dikelola seperti pernyataan (Prasetyo, 2016) bahwa pengelolaan keuangan sangat mendukung dalam upaya pembangunan Desa. Undang-undang nomor 06 Tahun 2014 yang membahas tentang Desa menyatakan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengurus wilayah pemerintahannya sendiri serta kepentingan setempat atas prakarsa masyarakat, hak asal-usul, hak tradisional yang dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komitmen yang dibangun oleh Pemerintah Indonesia ini merubah seluruh pandangan yang ada. Pembangunan dari Desa dilakukan karena melihat banyaknya potensi sumber daya desa yang dapat digali, namun sumber daya tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal (Ariadi, 2019).

Komitmen rencana pembangunan Desa yang dilakukan oleh pemerintah mendapatkan banyak kritik dan saran. Hal tersebut timbul karena adanya perubahan kebijakan yang cukup signifikan. Kekawatiran atas perubahan kebijakan yang baru muncul satu per satu. Demikian pula permasalahan-permasalahan yang diakibatkannya juga bermunculan. Hal ini memicu lahirnya sudut pandang baru. Berbagai macam penelitian dilakukan oleh kalangan akademisi untuk meluruskan pandangan dan mencari solusi dari setiap perbedaan. Penelitian dari (Yuliantini & Pramita, 2022) menyatakan Pemerintah desa diharapkan harus lebih mandiri dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki, termasuk didalamnya sumber daya keuangan. Namun perlu diketahui, (Septiani & Susilowati, 2022) Pemerintah Desa wajib menyusun laporan realisasi dan Pertanggungjawaban atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Untuk menjamin standarisasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBDes, Pemerintah pusat, Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama mengatasi permasalahan tersebut dengan cara mengembangkan aplikasi pengelolaan keuangan desa atau yang disebut dengan Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes). (Loupatty, 2022) Aplikasi SisKeuDes memiliki kelebihan karena mudah

digunakan, dapat dihubungkan dengan aplikasi keuangan Desa lainnya dan dilengkapi dengan sistem pengendalian internal. Penerapan SisKeuDes dapat memudahkan dan mempersingkat waktu penyusunan Laporan Keuangan Desa. Namun tidak semua orang mampu mengakses aplikasi ini karena kebutuhan layanan yang diakibatkan terjangkaunya jaringan dan faktor lainnya (Rabi'ah & Saputri, 2023).

Aparatur Desa yang memiliki kualifikasi pengetahuan yang rendah juga akan berdampak pada penerapan aplikasi SisKeuDes. Tidak hanya pada pelaksanaan program secara nyata, namun pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dikerjakan dapat membuat persepsi yang berbeda terhadap pemerintah desa itu sendiri. Permasalahan-permasalahan tersebut harus diantisipasi sejak dini, agar tidak terjadi ketimpangan program yang dilaksanakan dan kualitas laporan keuangan yang disusun. (Pratiwi & Pravasanti, 2020) diperlukan pendampingan dan pelatihan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) secara berkala terhadap Sumber Daya Manusia yang ada di desa agar memiliki kualifikasi yang cukup dalam mengoperasikan SisKeuDes secara maksimal dan kualitas kinerja aparatur desa menjadi meningkat.

Demi tercapainya keberhasilan suatu organisasi atau lembaga maka diperlukan optimalisasi segala aspek pendukungnya, termasuk optimalisasi kinerja setiap pegawai. (Ellyzar, 2017) mendefinisikan kinerja merupakan suatu keadaan yang harus dikonfirmasi dan diketahui oleh pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi yang dihubungkan dengan visi yang ditetapkan suatu perusahaan serta untuk mengetahui dampak negatif dan positif. Sebagai upaya mencapai keberhasilan dari tujuan suatu organisasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya di tingkat Desa, maka Pemerintah tingkat Desa harus dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan tingkat Desa, dan semua akhir kegiatan pengelolaan pemerintah tingkat desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Aplikasi SisKeuDes merupakan aplikasi yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang terdapat di Aplikasi Siskeudes dibuat sangat sederhana sehingga memudahkan dalam pengoperasiannya. Proses penginputan sesuai dengan transaksi yang ada, output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemerintah desa dituntut membuat beberapa laporan hasil dari pengelolaan keuangan desa dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Menurut (Watulingas et al., 2019) tujuan dari diterapkannya Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) adalah 1. Menata kelola keuangan desa secara optimal, 2. Sebagai alat kendali pengelolaan keuangan desa dan 3. Memudahkan dalam pelaporan keuangan.

Sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa dalam proses pengelolaan keuangan desa, Desa diharuskan melakukan kegiatan laporan sebagai berikut: 1. Siklus Perencanaan, 2. Siklus Pelaksanaan, 3. Siklus Penatausahaan, 4. Siklus Pelaporan, dan 5. Siklus Pertanggungjawaban. Siklus Perencanaan harus melibatkan masyarakat desa yang dimulai dari musyawarah dusun kemudian di angkat ke desa (Sobirin et al., 2021). Proses pelaksanaan harus menitik beratkan pada pengentasan kemiskinan dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa (Malahayati & Isnaini, 2022). Proses pelaksanaan atau penggunaan dana Desa harus diawasi secara penuh, serta harus selalu di catat antara transaksi penerimaan dan pengeluaran sebagai wujud dari penatausahaan (Fitra et al., 2023). Setelah ketiga proses tersebut dilakukan kemudian pemerintah desa harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan untuk melengkapi proses pengelolaan dana desa. Proses-proses tersebut harus dilakukan pada aplikasi yang dinamakan SisKeuDes.

Penerapan aplikasi SisKeuDes sangat penting untuk mempercepat kinerja Aparatur Desa dalam penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini membahas kemampuan Desa Kambingan Barat dalam menerapkan aplikasi sistem keuangan

desa sebagai dasar peningkatan kinerja aparatur desa. Desa Kambingan Barat merupakan salah satu desa di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep yang pernah ditetapkan sebagai desa terbaik nomor 2 (dua) se-Kabupaten. Desa Kambingan Barat sudah memakai aplikasi SisKeuDes dengan koneksi online sepanjang tahun 2020 yang sebelumnya masih menggunakan koneksi direct acces atau tidak online. Desa Kambingan Barat mempunyai website pribadi yang digunakan untuk memuat informasi terbaru tentang apa saja yang ada pada desa ini.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Demi tercapainya keberhasilan suatu organisasi atau lembaga maka diperlukan optimalisasi segala aspek pendukungnya, termasuk optimalisasi kinerja setiap pegawai. Ellyzar (2017) mendefinisikan kinerja merupakan suatu keadaan yang harus dikonfirmasi dan diketahui oleh pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi yang dihubungkan dengan visi yang ditetapkan suatu perusahaan serta untuk mengetahui dampak negatif dan positif. Keban (2004), menjelaskan terkait dengan kinerja Aparatur Desa merupakan hal yang perlu dan penting mendapat perhatian cukup dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya di tingkat Desa.

Sebagai upaya mencapai keberhasilan dari tujuan suatu organisasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya di tingkat Desa, maka Pemerintah tingkat Desa harus dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan tingkat Desa, dan semua akhir kegiatan pengelolaan pemerintah tingkat desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa Desa memiliki kesempatan untuk mengelola pemerintahannya, termasuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan serta kesejahteraannya. Menurut Pasal 72 dalam UU No. 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Desa juga mengelola keuangan dari pendapatan asli desa dan pendapatan

transfer lainnya dalam bentuk ADD (Alokasi Dana Desa) yang merupakan bagian dari pendapatan pajak dan kompensasi kabupaten/kota dan bantuan keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/kota. Berkembangnya aplikasi keuangan merupakan hal yang wajar bagi pemerintah atau organisasi, termasuk dalam pemerintahan tingkat desa. Hal ini menjadikan kualitas laporan keuangan lebih profesional, berkualitas, efisien dan efektif.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) merupakan aplikasi yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang terdapat di Aplikasi Siskeudes dibuat sangat sederhana sehingga memudahkan dalam pengoperasiannya. Proses penginputan sesuai dengan transaksi yang ada, output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah desa dituntut membuat beberapa laporan hasil dari pengelolaan keuangan desa dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Menurut (Watulingas et al., 2019) tujuan dari diterapkannya Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) adalah:

1. Menata kelola keuangan desa secara optimal
2. Sebagai alat kendali pengelolaan keuangan desa
3. Memudahkan dalam pelaporan keuangan

Sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa dalam proses pengelolaan keuangan desa, Desa diharuskan melakukan kegiatan laporan sebagai berikut:

1. Siklus Perencanaan
 - a. RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa)
 - b. APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)
2. Siklus Pelaksanaan
 - a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
 - 1) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa

- 2) Rencana Kerja Kegiatan Desa
- 3) Rencana Anggaran Biaya
- b. Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
 - 1) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan
 - 2) Rencana Anggaran Biaya Perubahan
- c. RAK Desa (Rencana Anggaran Kas Desa)
- d. DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan)
3. Siklus Penatausahaan
 - a. Buku Pembantu Bank
 - b. Buku Pembantu Pajak
 - c. Buku Pembantu Panjar
4. Siklus Pelaporan
 - a. Laporan Realisasi APB Desa Semesteran
5. Siklus Pertanggungjawaban
 - a. Laporan Keuangan
 - 1) Laporan Realisasi APB Desa
 - 2) Catatan Atas Laporan Keuangan
 - b. Laporan Realisasi Kegiatan

METODE PENELITIAN

Analisis kualitatif deskriptif digunakan dalam penyusunan penelitian ini guna menjabarkan situasi yang ada pada objek penelitian secara tepat. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari individu yang diamati. Penelitian ini memandang individu sebagai objek diarahkan pada latar secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini, individu yang menjadi objek penelitian atau sumber informasi tidak di isolasikan kedalam variabel atau

hipotesis, tetapi harus dipandang sebagai bagaian dari sesuatu yang utuh (tunggal) (Moleong, 2013).

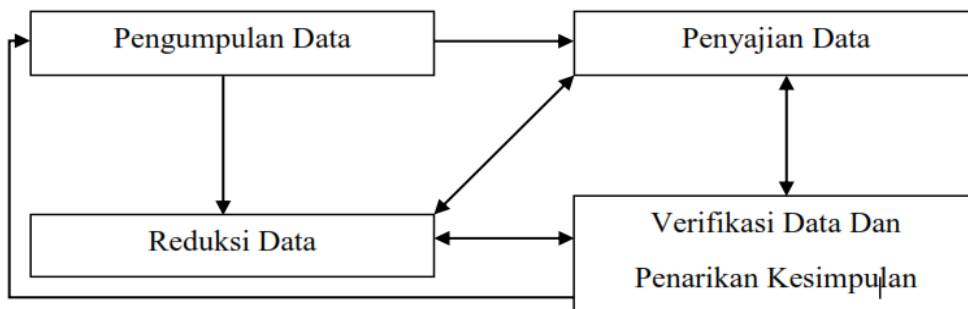
Metode penelitian kualitatif digunakan karena pertimbangan beberapa faktor. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Laporan penelitian berisi tentang kutipan-kutipan data untung memberi gambaran penyajian laporan. Data berasal dari naskah hasil wawancara, catatan lapangan, dan catatan atau memo.

Lokasi penelitian ini pada Desa Kambingan Barat, Kabupaten Sumenep. Desa ini di ambil karena termasuk dalam kategori Desa Berkembang, selain itu Desa ini menjadi desa terbaik no 2 se Kabupaten Sumenep dan sudah mempunyai website pribadi yang selalu di update. Fokus penelitian ini tentang bagaimana penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam meningkatkan kinerja aparatur desa di Desa Kambingan Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. Persiapan yang telah dilakukan aparatur pemerintah desa dalam penerapan aplikasi Siskeudes kendala yang ditemukan ketika mengoperasikan Siskeudes sehingga mendapatkan berpengaruh pada sistem kerja aparatur desa serta manfaat yang dirasakan dari pengimplementasian Siskeudes. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang merupakan hasil dari berbagai wawancara dan observasi yang dilakukan kepada sumber yang telah ditentukan.

Informan yang dipilih berdasarkan kebutuhan dari penelitian sesuai dengan upaya yang dilakukan sebelumnya melalui wawancara kepada Sekretaris Desa Kambingan Barat terkait dengan isi dari Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penjelasan dari hasil wawancara kepada Sekretaris Desa Kambingan Barat mengarah pada pihak yang jadikan sebagai Informan penelitian, yang berhubungan langsung dengan aplikasi SisKeuDes antara lain :

1. Farida Duwi Sulistia H selaku Kepala Desa (PKPKD)
2. Faizul Amali selaku Sekretaris Desa (PPKD)
3. Hosriyanto sebagai Kaur Keuangan (PPKD)
4. Eko Ramadhana sebagai Operator Desa

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang digagas oleh (Miles & Huberman, 1992). Teknik analisis data tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 1
Teknik Analisis Data
Sumber: Miles dan Huberman (1992)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas akuntabel, partisipatif dan transparan, serta dilakukan dengan disiplin dan tertib anggaran. Pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan Desa. SisKeuDes hadir sebagai alat pengelola Keuangan Desa. Penerapan aplikasi SisKeuDes memudahkan pengawalan Keuangan Desa agar proses pembangunan Desa lebih akuntabel dan transparan. Di sampaikan oleh Kaur Keuangan Desa Kambingan Barat bahwa:

“Desa Kambingan Barat sudah memakai aplikasi SisKeuDes sejak tahun 2019.”

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara untuk menjalankan SisKeuDes Desa Kambingan Barat mempunyai 3 operator desa dalam membantu pekerjaan aparatur desa. Operator dimaksudkan untuk membantu aparatur desa dalam pengaplikasian Sistem

Keuangan Desa. Namun perlu diketahui pernyataan dari Faizul Amali selaku Sekretaris Desa Kambingan Barat bawa:

“tidak semua desa mempunyai operator, karena tidak semua desa memiliki kualifikasi aparatur yang kurang menguasai teknologi Informasi.”

Sejak Desa Kambingan Barat memakai aplikasi SisKeuDes, penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Aplikasi Siskeudes memberikan kemudahan bagi aparatur Desa karena proses penginputan hanya membutuhkan waktu yang singkat dan data dapat dipastikan sudah sesuai dengan transaksi yang ada. Aplikasi Siskeudes juga menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun perlu diketahui sesuai pernyataan Farida Duwi Sulistia H, Kepala Desa Kambingan Barat bahwa:

“aplikasi Siskeudes berbasis online memiliki beberapa kendala, yang pertama ketika terjadi pemadaman listrik, aplikasi Siskeudes tidak dapat diakses. Kendala yang kedua ketika setiap tahun ada update aplikasi SisKeuDes, Pemerintah sering terlambat dalam memberikan penyuluhan atau pelatihan ulang, sehingga terjadi kebingungan terhadap fitur-fitur baru di setiap update-an tersebut”.

Untuk kendala yang di akibatkan langsung oleh aplikasi SisKeuDes hampir tidak ada. Sering kali kendala diakibatkan dari keadaan-keadaan eksternal aplikasi. Namun perlu diketahui aplikasi Siskeudes tidak sepenuhnya sempurna. Jika di lihat dari fitur yang berhubungan dengan aset, fitur didalam aplikasi SisKeuDes dianggap kurang kompleks. Kompleksitas fitur aplikasi SisKeuDes juga disampaikan oleh bapak Hosriyanto selaku Kaur Keuangan yaitu tentang fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Siskeudes yang menurutnya sulit diaplikasikan, misalnya dalam pendataan aset. Pada posisi pendataan aset sering terjadi ketidaksinambungan antara peraturan dan pengaplikasian di lapangan. Disampaikan juga oleh Eko Ramadhana selaku operator Desa Kambingan Barat, kendala dalam pengimplementasian aplikasi SisKeuDes terjadi setiap ada update aplikasi karena penyuluhannya sangat lambat

dan beberapa fitur yang ada pada aplikasi SisKeuDes susah dimengerti karena terpengaruh update aplikasi yang susah di pahami.

Keterlambatan dalam penyuluhan akan menjadi sebuah kendala dalam pengelolaan Keuangan Desa pada aplikasi SisKeuDes dan akan mempengaruhi keandalan laporan keuangan Desa. Tingkat keandalan laporan keuangan juga ditunjang dari kualitas kinerja aparatur Desa. Tolok ukur pengukuran kinerja aparatur desa diartikan sebagai jumlah yang harus dicapai atau diselesaikan. Pengukurannya melibatkan perhitungan jumlah keluaran pelaksanaan atau proses kegiatan yang dihasilkan. Data kuantitas yang dihasilkan Pemerintah Desa Kambingan Barat beserta kesesuaian dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang target output yang harus dikerjakan dan output yang dihasilkan oleh aparatur Desa Kambingan Barat, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada kaur keuangan dan operator desa adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kesesuaian Kuantitas dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No	Permendagri nomor 20 tahun 2018	Kesesuaian	
		Sesuai	Tidak Sesuai
1	Siklus Perencanaan		
	RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa)	√	
	APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)	√	
2	Siklus Pelaksanaan		
	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)		
	Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa	√	
	Rencana Kerja Kegiatan Desa	√	
	Rencana Anggaran Biaya	√	
	Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)		
	Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan		√
	Rencana Anggaran Biaya Perubahan		√
	RAK Desa (Rencana Anggaran Kas Desa)	√	
	DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan)		√
3	Siklus Penatausahaan		
	Buku Pembantu Bank	√	
	Buku Pembantu Pajak	√	
	Buku Pembantu Panjar	√	
4	Siklus Pelaporan		
	Laporan Realisasi APB Desa Semesteran	√	
5	Siklus Pertanggungjawaban		
	Laporan Keuangan		

Laporan Realisasi APB Desa	√
Catatan Atas Laporan Keuangan	√
Laporan Realisasi Kegiatan	√

Sumber: Data diolah, Maret (2022)

Tabel hasil kesesuaian menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Desa Kambingan Barat secara penuh sudah dapat dikatakan sesuai dengan Permendagri nomor 20 Tahun 2018. Berdasarkan tabel tersebut 81% sudah dapat dikatakan sesuai. Sisanya 19% masih belum sesuai terdapat pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan, Rencana Anggaran Biaya Perubahan, dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan). Ketidak kesesuaian terhadap tiga indikator tersebut dikarenakan pemerintah desa kambingan barat belum melaksanakan hal tersebut. Seperti pernyataan Farida Duwi Sulistia H selaku kepala desa, Faizul amali selaku sekretaris desa, Hosriyanto selaku kaur keuangan, dan Eko Ramadhana selaku operator desa sebagai berikut:

“Semuanya sudah dilaksanakan kecuali DPPA dan DPAL, kalo DPPA tidak dilaksanakan karena sepanjang tahun 2021 kita tidak melakukan perubahan rencana APBdesa jadi anggaran tetap seperti perencanaan di awal. Kalo DPAL tidak dilaksanakan karena di tahun 2021 seluruh kegiatan sudah terealisasi seluruhnya”.

Disamping kuantitas, pengukuran kinerja Pemerintah Desa Kambingan Barat secara penuh sudah dapat dikatakan berhasil jika mutu yang dihasilkan mencerminkan pengukuran tingkat kepuasan, yaitu seberapa baik penyelesaian dari program-program yang direncanakan. Aplikasi Siskeudes membantu mendukung pengelolaan keuangan desa dan menghasilkan laporan keuangan yang baik sehingga kualitas kinerja keuangan Pemerintah Desa Kambingan Barat dapat di ukur dengan andal. Disamping penyajian laporan keuangan yang baik, kinerja aparatur Desa dari sisi tugas pokok dan fungsi, persamaan pemikiran juga dapat menunjang kesuksesan perencanaan program sehingga mencapai kualitas yang baik. Tentang hal tersebut Farida Duwi Sulistia H selaku kepala desa Kambingan Barat menyampaikan:

“Sudah 80% aparaturnya menjalankan tupoksinya dengan, kami menggunakan operator desa untuk membantu kaur keuangan dalam mengoperasikan Siskeudes. Adanya aplikasi ini, dapat meningkatkan kinerja aparaturnya kami, dan penyelesaian pembuatan laporan keuangan dapat lebih cepat terselesaikan. Harapan kami tentunya lebih ditingkatkan lagi untuk kinerja Pemerintah Desa Kambingan Barat agar lebih berkembang dan dapat mempertahankan prestasi yang telah diraih”.

Secara keseluruhan hampir 100% aparaturnya desa kambingan barat sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara benar. Adanya aplikasi SisKeuDes di tenggarai sangat mendukung aparaturnya Desa Kambingan Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Setiap aparaturnya Desa juga dapat melihat kinerja yang dihasilkan dari implementasi aplikasi Siskeudes. Aplikasi SisKeuDes juga mampu mengakomodir seluruh regulasi terkait dengan keuangan desa, dirancang secara terintegrasi, user friendly, dan desktop application serta memiliki sistem pengendalian intern yang melekat dan efektif dalam menghasilkan informasi keuangan. (Yunitasari et al., 2023) Aplikasi Siskeudes bertujuan untuk memudahkan aparaturnya pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.

Aplikasi SisKeuDes diciptakan agar pengguna dapat melihat dan membaca keinginan masyarakat yang dituangkan dalam program pemerintah, selain itu aplikasi SisKeuDes juga digunakan sebagai alat untuk mengelola dan mengalokasikan dana desa secara efektif dan efisien. Aplikasi Siskeudes merupakan sebuah alat bantu Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Aplikasi SisKeuDes juga digunakan sebagai alat untuk perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban yang terkomputerisasi. Aplikasi Siskeudes dapat terintegrasi dengan aplikasi lainnya di Desa karena telah dilengkapi dengan sistem pengendalian intern. Penelitian dari (Arianto & Kahpi, 2020) menyatakan bahwa aplikasi Siskeudes memiliki kelebihan karena memberikan dampak yang baik dari segi efisiensi waktu dan biaya. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat menciptakan akuntabilitas dan transparansi yang baik dari segi Informasi.

Pengimplementasian aplikasi Siskeudes sangat membantu kinerja Aparatur Desa Kambingan Barat. Pekerjaan yang dilakukan dapat lebih terencana, terarah dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Selain itu, implementasi aplikasi SisKeuDes juga menjadi salah satu faktor tersistematikanya administrasi pemerintah Desa Kambingan Barat, sehingga pada tahun 2020 pemerintah Desa Kambingan Barat memperoleh penghargaan berupa desa terbaik nomer dua se-Kabupaten Sumenep.

Sistematika kerapian administrasi yang di gagas oleh aplikasi SiskKeuDes yang menjadi salah satu tolok ukur penilaian. Hal ini membuat pegawai semakin termotivasi untuk bekerja dengan baik dan pegawai menjadi termotivasi juga untuk mempertahankan prestasi tersebut sehingga hal tersebut akan mampu membantu desa dalam menciptakan aparatur desa yang lebih kompeten. Hasil dan manfaat yang dirasakan aparatur desa di Desa Kambingan Barat Kabupaten Sumenep membuktikan ada kesesuaian antara hasil dan harapan Kementerian Dalam Negeri bersama BPKP dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

Terdapat dokumen pendukung, dimana desa Kambingan Barat telah melakukan proses perencanaan pengelolaan keuangan yaitu adanya bukti perencanaan RPJMDes, RKPDes dan APBDes. Proses pelaksanaan pengelolaan yang dilakukan Desa Kambingan Barat yaitu dengan mengajukan besarnya dana melalui Dokumen yang berisikan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Penatausahaan dilakukan setiap bulan oleh bagian keuangan Desa. Pencatatan uang masuk dan keluar dilakukan secara periodik, menggunakan SisKeuDes. Pertanggungjawaban dan pelaporan telah terintegrasi pada Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang di kenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) APBDes yang berisi Buku Kas Umum (BKU), kuitansi, nota, tanda terima kegiatan, dan lampiran-lampiran kegiatan lainnya.

SIMPULAN

Pengimplementasian aplikasi SisKeuDes oleh Desa Kambingan Barat sangat diapresiasi oleh Aparatur Desa karena aplikasi tersebut sangat bermanfaat baik bagi Desa

Kambingan Barat. Aplikasi tersebut mampu membuat pengelolaan keuangan desa menjadi lebih efektif dan efisien. Aplikasi SisKeuDes juga mampu meminimalisir pekerjaan yang membutuhkan standar atau alur waktu tunggu yang lama. Aplikasi SisKeuDes mampu mengintegrasikan pengelolaan keuangan desa dengan aplikasi lainnya.

Namun, karena aplikasi SisKeuDes berbasis online akan mendapatkan permasalahan ketika terjadi pemadaman listrik dan koneksi internet terputus. Uapaya yang dilakukan aparatur desa Desa Kambingan Barat dalam mengatasi kendala ini dengan melakukan input secara offline menggunakan aplikasi Excel yang nantinya akan disalin ke aplikasi SisKeuDes. Kendala lainnya terletak pada pemerintah Kabupaten Sumenep yang lambat dalam melakukan penyuluhan dan pelatihan ketika ada update aplikasi di setiap tahunnya maka dari itu aparatur desa Kambingan Barat saling menjaga komunikasi antar aparatur desa lainnya untuk berdiskusi tentang pembaharuan aplikasi Siskeudes. Fitur di dalam aplikasi SisKeuDes sudah dianggap kompleks oleh aparatur desa Kambingan Barat karena pada fitur asetnya langsung dicantumkan secara total atau tidak perbidang sehingga aparatur desa Kambingan Barat namun untuk keperluan tertentu masih dibutuhkan catatan rincian aset manual aset sendiri.

Aparatur desa Kambingan Barat khususnya PKPKD dan PPKD akan lebih baik kinerjanya jika mengetahui lebih dalam tentang aplikasi SisKeuDes. Jika PKPKD dan PPKD lebih paham lagi terkait teknologi, maka lingkup menu yang ada pada aplikasi SisKeuDes akan mudah dipahami dan akan semakin lebih mempercepat pekerjaan. Untuk menuju kinerja SDM aparatur yang jauh lebih baik tersebut, pemerintah Desa Kambingan Barat bisa berinisiatif untuk mengadakan pelatihan tentang teknologi bagi seluruh aparatur Desa Kambingan Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Ariadi, A. (2019). Perencanaan Pembangunan Desa. *Meraja Journal*, 2(2), 135–147. <https://merajajournal.com/index.php/mrj/article/download/54/45>

- Arianto, & Kahpi, A. (2020). Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 2(2), 183–194.
- Ellyzar, N. (2017). *Evaluasi Kinerja : Penilaian Kinerja Atas Dasar Prestasi Kerja Berorientasi*. Gajah Mada University Press. https://books.google.co.id/books?op=lookup&id=ni9tDwAAQBAJ&continue=https://books.google.co.id/books?id%3Dni9tDwAAQBAJ%26pg%3DPA1%26hl%3Did%26source%3Dgbs_toc_r&hl=id
- Fitra, H., Taqwa, S., Halmawati, H., Mulyani, E., Agustin, H., Sebrina, N., & Mori, W. F. (2023). Tinjauan Penatausahaan Keuangan Nagari di Kabupaten Agam dengan Menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 5(2), 788–800. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.837>
- Loupatty, L. G. (2022). Evaluasi Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa/Negeri Di Kota Ambon. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1).
- Malahayati, R., & Isnaini, I. (2022). Pengelolaan dan penggunaan dana desa pada Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh tahun 2019-2021. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(5), 2239–2249. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i5.2350>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif*. Penerbit Universitas Indonesia (UI -Press). <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=298242>
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (C. R. Semiawan (ed.); Revisi). PT. Remaja Rosdakarya.
- Nain, U. (2019). *Pembangunan Desa (P3Pd)*. 1–141.
- Prasetyo, R. A. (2016). *Jurnal Dialektika Volume XI*. Maret, XI(1), 86.
- Pratiwi, D. N., & Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Penggunaan Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 217–223. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.770>
- Rabi'ah, & Saputri, N. A. O. (2023). Analisa Keuangan Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dengan Model. *JUPITER*, 15(1), 327–336.
- Septiani, I., & Susilowati, L. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA PADA MASA JIMEA | *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi)*. 6(2), 1658–1676.
- Sobirin, I., Gazali, M., & Digdowiseiso, K. (2021). Kabupaten Pandeglang Tahun 2021. *JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION*, 4(1), 143–156.
- Watulingas, P., Kalangi, L., & Suwetja, I. G. (2019). INDONESIA ACCOUNTING Peranan Sistem Keuangan Desa terhadap Kinerja. *INDONESIA ACCOUNTING JOURNAL*, 1(2), 105–111.
- Yuliantini, N. P. R., & Pramita, K. D. (2022). *Jurnal komunikasi hukum*. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8(1), 469–480.